



Denpasar Pertahankan WTP Tiga Kali Berturut-turut

Rai Mantra: Tantangan Wujudkan "Good Governance"

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara, tahun 2015 ini berhasil mempertahankan prestasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP atas hasil pengelolaan keuangan daerah ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013. LHP BPK diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syifa, Jumat (5/6) kemarin di ruang pertemuan BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Denpasar.

Laporan ini diterima Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua DPRD I Made Muliawan Arya, dan pimpinan SKPD Pemkot Denpasar. "Dari hasil pemeriksaan keuangan Pemkot Denpasar yang telah kami lakukan selama dua bulan, tahun ini kembali memberikan opini WTP," ujar Arman Syifa.

Pada tahun sebelumnya, menurut Arman Syifa, pihaknya juga telah melakukan penilaian keuangan Pemkot Denpasar dengan perolehan opini WTP. "Dari opini ini kami menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar telah berjalan secara wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan, meski masih harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," jelasnya.

Arman Syifa mengatakan, dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan selama dua bulan di Pemkot Denpasar, ini merupakan hasil dari prestasi dan kerja keras seluruh aparatur Pemkot Denpasar. Dari hasil ini, nantinya dapat sebagai bahan masukan kepada DPRD Kota Denpasar dengan fungsi pengawasannya, serta dapat menjadi masukan perbaikan kualitas laporan keuangan pada masa yang akan datang.

Wali Kota Rai Mantra mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali yang telah melakukan pemeriksaan keuangan Pemkot Denpasar, yang tahun



WTP - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syifa menyerahkan penghargaan opini WTP kepada Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di ruang pertemuan BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Denpasar, Jumat (5/6) kemarin.

ini kembali memberikan opini WTP. Wali Kota Rai Mantra juga menyadari, perolehan WTP ini menjadi tantangan yang sangat berat ke depan. Dengan arahan dari BPK RI Perwakilan Bali, diharapkan dapat terus memberikan bimbingan untuk perbaikan ke depan yang harus ditindaklanjuti. Dengan slogan *Good Governance*, merupakan hal yang sangat berat untuk dicapai yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini. Dengan tuntutan transparansi yang akuntabel, sangat sulit dipenuhi tanpa didukung dengan kapasitas dan support dari yang berwenang. "Dari opini ini, kita harus bisa menjadi yang lebih baik dengan pembenahan dan perbaikan sistem yang harus terus ditingkatkan," ujar Rai Mantra.

Ketua DPRD Kota Denpasar I Gst. Ngurah Gede mengatakan, DPRD yang memiliki tugas fungsi pokok dalam pengawasan di Pemkot Denpasar, dengan hasil pemeriksaan ini dapat sebagai acuan untuk pembenahan diri. "Mudah-mudahan perolehan WTP ini dapat menjadi tindak lanjut pembenahan diri, dan akan terus melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan ke depan," ujarnya. (ad419)

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 2



Terganjil Pengelolaan Aset

Klungkung Gagal Raih Predikat WTP

Semarapura (Bali Post)-

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali, nampaknya masih jauh dari Kabupaten Klungkung. Sebab, Klungkung di bawah kepemimpinan Nyoman Suwirta kembali gagal meraih predikat teratas BPK tersebut. Klungkung hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hasil penilaian tersebut diakui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung Gusti Ngurah Putra, saat ditemui, Jumat (5/6) kemarin. Hasil pemeriksaan yang diumumkan untuk Kabupaten Klungkung, Kamis lalu di Denpasar, memperlihatkan Klungkung belum bisa mengatasi sejumlah masalah yang selalu berulang tahun di dalam catatan BPK. Urusan predikat BPK, nampaknya Klungkung masih kalah jauh dengan sejumlah kabupaten lain di Bali, yang berhasil meraih WTP tahun ini, seperti Buleleng, Tabanan dan Gianyar.

Gusti Ngurah Putra mengatakan ada sejumlah catatan BPK untuk Klungkung. Masalah paling serius adalah terkait dengan pengelolaan aset yang tak kunjung beres dalam beberapa tahun terakhir. Pengelolaan aset seperti

tanah, gedung dan peralatan lainnya, kata Gusti Ngurah Putra, sebagaimana catatan BPK, baik keberadaan, bagaimana dan siapa yang mengelolanya harus jelas. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan pemeriksaan oleh BPK. Namun, seperti apa problem detail dari masalah pengelolaan aset ini sebenarnya, Gusti Ngurah Putra belum bisa menjelaskan.

"Itu sifatnya teknis, kabid saya lebih tahu," jelasnya. Menyikapi hasil ini, masalah aset harus bisa dituntaskan tahun ini, jika ingin meraih predikat WTP untuk pertama kalinya tahun depan.

Padahal, kata dia, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sangat berharap hal ini harus ditangani dengan cepat. "Apapun yang menjadi komitmen pimpinan, tentu kami akan sikapi," tegasnya. Di luar masalah aset, Gusti Ngu-

rah Putra memastikan tidak ada temuan kerugian negara dalam catatan BPK. Sehingga, ia yakin jika masalah aset bisa diatasi tahun ini, tahun depan Klungkung bukan tidak mungkin bisa mengikuti jejak kabupaten lain yang sudah lebih dulu merasakan predikat WTP di Bali.

Tahun lalu sewaktu memperoleh predikat serupa, Pemkab Klungkung mencanangkan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan pendataan ulang masalah aset. Temuan BPK soal aset saat itu paling banyak terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Sehingga, dengan evaluasi menyeluruh saat itu, Klungkung menargetkan dapat WTP tahun ini. Namun, nampaknya target itu masih jauh terealisasi, jika masalah aset belum tertangani dengan tuntas. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 20



Korupsi Pipanisasi

Banding, Mantan Kadis PU Karangasem Divonis Lebih Tinggi

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar rupanya tidak sependapat dengan majelis hakim Tipikor Denpasar yang menyidangkan perkara dugaan korupsi pipanisasi Karangasem, dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem Ir. I Wayan Arnawa. Ya, di tingkat banding, hakim PT justru menjatuhkan vonis lebih tinggi terhadap Arnawa, yakni dari 1,5 tahun penjara menjadi dua tahun penjara.

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar mengenai lamanya putusan," kata hakim dalam amar putusan yang sudah diterima pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sebagai penuntut umum.

Saat dimintai konfirmasi mengenai vonis PT tersebut, Jumat (5/6) kemarin, kuasa hukum Arnawa, Ketut Bakuh, membenarkan bahwa putusan Arnawa naik. "Ya naik menjadi dua tahun," katanya.

Informasi lainnya yang diterima, bahwa perkara ini kemungkinan akan sampai ke tingkat kasasi. Paslanya, tim jaksa penuntut umum (JPU) Hari Soetopo yang ditemui di Kejati Bali, mengisyaratkan bahwa pihaknya melakukan upaya hukum kasasi. Sebab, vonis PT dan Pengadilan Tingkat Pertama masih jauh dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU dari Kejati Bali dalam amar tuntutan meminta pada majelis hakim untuk menghukum Arnawa selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sebagaimana diketahui, Wayan Arnawa yang

mantan Kadis PU Karangasem divonis 1,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, terdakwa Arnawa dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kedalam UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah yakni menguntungkan pihak lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan subsidier, yakni pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam perkara ini, terdakwa selaku Kadis PU Kabupaten Karangasem dalam rentang waktu tahun 2009 dan 2010, menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan telah menerbitkan surat persetujuan pembayaran dalam proyek pengembangan sistem distribusi air minum dan pengadaan konstruksi jaringan air minum yang lazim dikenal sebagai proyek pipanisasi. Proyek senilai Rp 29 miliar ini untuk empat kecamatan, yakni Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu. Proyek tersebut dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) selaku pemenang tender. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2010, realisasi anggaran negara untuk pembayaran pipa galvani senilai Rp 9.874.405.380, sedangkan nilai barang yang diterima beserta ongkos kirim adalah Rp 6.170.082.078. Sehingga terjadi selisih Rp 3.704.323.302 sebagai kerugian keuangan negara. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 3